



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**



<http://diskominfo.diskomutprov.go.id>

# Tim Penyusun



PENANGGUNG JAWAB	: KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA DRS. JUMSADI DAMANIK, SH, M.HUM
KETUA	: KABID APLIKASI TELEMATIKA DINAS KOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA DRA. ELI SUHAERİYAH, M.Si
WAKIL KETUA	: KASI SEKSI PUSAT INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, SSTP, M.Si
SEKRETARIS	: MULIDA
KONSULTAN	: DRA. YUSNIARTI PILIANG
EDITOR	: DINI SYILVIA MAISYAROH, SP SOLATIAH NASUTION, SH
OPERATOR	: NURIN, S.KOM NUR KADIJAH, SE
REPORTER	: HUMAS PEMPROVSU   SRY WAHYUNI SARAGIH   SUDARTO
KAMERAMEN	: DEDE DARMA SIAGIAN, S.KOM   M. ICHSAN HIDAYAT, S.KOM   SAIDIL BAYAN LUBIS, S.KOM LINTANG PRIADI PURBA, AMD   RISKI HANDRIAN
FOTOGRAFER	: CANDRA SEGER, SE   KHAIRUL HIFZI, ST   MUNAWAR HARAHAP, SH   R. MUHAMMAD IRVAN RIDHO, S.Ti   RIZKY HENDARTA TAMIN DAMANIK

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho\_Nya, maka buku "Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Dalam Lensa" Edisi Triwulan II Tahun 2016 dapat disusun. Buku ini merupakan dokumentasi foto yang disertai berita kegiatan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2016.

Penyusunan buku ini merupakan salah satu capaian dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik khususnya Kegiatan Operasional Pusat Informasi Publik dan Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik yang didasarkan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika membuka diri dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media buku ini.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif dalam penyusunan buku ini. Kami berharap semoga kehadiran buku ini dapat membawa manfaat kepada para pembaca sekalian

Medan, Oktober 2016

Tim Penyusun



# Daftar Isi

## Juli

- 20150701 Menghadiri Apel Terakhir Pra Libur Lebaran dan Penyerahan Zakat BAZNAS Provsu
- 20160703 Menghadiri Buka Puasa Bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Ikatan Jurnalis Televisi Indoensia (IJTI) Sumut dan Media Online
- 20160704 Mendampingi Gubsu Meninjau RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar
- 20160704 Mendampingi Gubsu Berkunjung ke Museum Becak *Birmingham Small Army* (BSA) Kota Pematang Siantar
- 20160704 Melaksanakan Sholat Isya Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat
- 20160707 Halal Bi Halal Idul Fitri 1437 H
- 20160711 Menghadiri Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1437 H bersama PNS Pemprovsu
- 20160721 Menghadiri Kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) RI
- 20160722 Memimpin Rapat Evaluasi Kesiapan Lomba Pertunjukan Rakyat *Group Deli Company* yang akan tampil di Ajang Pekan Inovasi Nasional di Kutai
- 20160722 Menerima Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka Meninjau Langsung Bidang Pendidikan Kejuruan
- 20160722 Memimpin Rapat Koordinasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Menuju *Smart Province*

## Agustus

- 20150804 Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Bakornas) TPID Tahun 2016
- 20160809 Menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) se-Sumut
- 20160810 Memimpin Rapat Bersama Asperindo tentang Penyesuaian Nomenklatur Jasa Titipan
- 20160811 Menghadiri Pembukaan Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2016
- 20160811 Membuka Acara *Coffee Morning* dalam rangka HUT RI ke-71 Tahun 2016
- 20160815 Menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provsu
- 20160816 Membuka Diskusi Panel/ Sarasehan dalam rangka HUT RI ke-71 Tahun 2016
- 20160817 Memimpin Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-71 Tahun 2016
- 20160817 Mengadakan Perlombaan dalam rangka Kemerdekaan RI ke-71
- 20160821 Mengikuti Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba
- 20160825 Memimpin Rapat Evaluasi Bidang Pos dan Telekomunikasi (POSTEL) Diskominfo Provsu
- 20160827 Menghadiri Peringatan Dies Natalis ke-64 Universitas Sumatera Utara Tahun 2016

## September

- 20150901 Menerima Audiensi Surat Kabar "CENTRAL"
- 20160902 Menghadiri Rapat Koordinasi bersama Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 20160905 Entry Meeting Bersama Tim Monitoring Pencapaian Rencana Aksi di Provinsi Sumatera Utara
- 20160906 Menghadiri Training Of Trainer (TOT) Sistem dan Komite Integritas Kepala SKPD Provsu
- 20160906 Menghadiri Evaluasi Progres Rencana Aksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 20160907 Menghadiri Penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota di Sumut oleh KPK RI
- 20160908 Membuka *Coffee Morning* dalam rangka Menyambut Hari Raya Idul Adha 1437 H
- 20160912 Melaksanakan Penyembelihan Hewan Qurban 1437 H
- 20160915 Membuka Bimbingan Teknis PPID Provsu bagi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- 20160916 Menghadiri Rapat Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
- 20160916 Membuka Rapat Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- 20160919 Menghadiri Pembukaan Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
- 20160920 Menghadiri Kunjungan Dewan Pertahanan Nasional













**KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERIYAH, M.Si**  
Menghadiri Apel Terakhir Pra Libur Lebaran dan Penyerahan Zakat BAZNAS Provsu  
Halaman Kantor Gubsu, Jumat 1 Juli 2016



## PIMPIN APEL PAGI TERAKHIR: GUBSU TEGAS INGATKAN ASN JANGAN TAMBAH WAKTU LIBUR LEBARAN SECARA PRIBADI

**Medan,** Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si secara tegas mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I dan II di jajaran Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumut untuk tidak menambah waktu libur Lebaran 1437 Hijriyah dengan sesuka hati tanpa alasan jelas. ANS yang melanggar aturan akan diberikan sanksi.

Penegasan tersebut disampaikan Tengku Erry Nuradi saat memimpin Apel Pagi Terakhir sebelum libur nasional Idul Fitri di lapangan apel Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Jumat (1/7/2016).

Dalam amanatnya, Gubsu mengatakan, pemerintah secara nasional telah memberikan waktu libur Lebaran sejak tanggal 4 hingga 11 Juli 2016 mendatang. "ANS kita harapkan sudah masuk kantor dan bekerja kembali pada Senin tanggal 11 Juni 2016 mendatang. Jangan ada yang bolos tanpa alasan yang jelas. Bagi yang melanggar, Badan Kepegawaian Daerah akan memberikan sanksi," tegas Gubsu.

Dalam kesempatan itu, Gubsu juga menyampaikan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait larangan gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan melayangkan surat imbauan No B.5388/01-13/06/2016 tanggal 22 Juni 2016 Tentang Imbauan Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah.

Kepada segenap jajaran ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk mengindahkan imbauan KPK ini. Sebagai ANS, kita layak menjadi teladan dengan menolak pemberian uang, bingkisan, parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan, pengusaha, masyarakat yang berhubungan dengan jabatannya. "ASN juga kita imbau tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik atau pulang ke kampung halaman. Fasilitas negara hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat," sebut Gubsu.

Disela Apel Pagi Terakhir, Gubsu juga menyerahkan bantuan infaq kepada 455 orang ASN Golongan I dan II di jajaran Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumut. Santunan tersebut dimaksudkan meringankan kebutuhan ekonomi ANS berpenghasilan rendah dalam persiapan penyambutan Idul Fitri 2016. Bantuan tersebut bersumber dari dananya himpunan zakat dan infaq dari ASN beragama Islam di lingkungan Pemprov Sumut yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumut.

Gubsu juga menyinggung terkait SKPD di jajaran Pemprov Sumut yang belum sepenuhnya menyetorkan zakat, infaq melalui Bank Sumut yang ditunjuk Baznas Sumut. "Saya minta, Bendahara Gaji setiap SKPD untuk tidak menahan pemotongan zakat pejabat eselon dan infaq Aparatur Sipil Negara. Jangan ditahan-tahan. Segera setorkan ke Baznas Provinsi Sumatera Utara," pesan Gubsu.

Ketua Baznas H. Amansyah Nasution, M.Si, besaran infak di lingkungan ASN dan SKPD Sumut sejak Januari hingga Juni 2016 sebesar Rp 400.476.250. Sedangkan pengumpulan zakat dari pejabat SKPD Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai Eselon sebesar Rp 296.417.563. Tahun ini, Baznas Sumut menyalurkan bantuan infaq bagi 455 PNS muslim yang terdiri dari 178 orang golongan I dan 277 orang golongan II, masing-masing mendapatkan Rp 300 ribu. Total bantuan yang disalurkan Rp 136.300.000. "Masih ada SKPD di jajaran Pemprov Sumut yang belum sepenuhnya menyetorkan zakat, infaq melalui Bank Sumut yang ditunjuk Baznas Sumut," ujar Amansyah.

## SILATURAHMI DAN BERBUKA PUASA DENGAN WARTAWAN, GUBSU AJAK MEDIA BERSINERGI BANGUN SUMUT

**Medan**, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menyatakan apresiasi atas peran media massa yang terlibat aktif dalam mendorong roda pembangunan di Sumut. Apresiasi tersebut disampaikan Gubsu dalam acara silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama dengan organisasi pers dan wartawan media cetak, elektronik televisi, radio dan media online di rumah dinas Gubernur Sumut (Gubernuran), Jl Sudirman Medan, Minggu (3/7/2017).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hononangan Laoly, Kapolda Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto, Pih Kepala Dinas Kominfo Sumut M Ayub, Ketua Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Sumut Parianda Putra Sinik, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut Hermansyah, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Media Cyber Indonesia (AMCI) Sumut Fachruddin Pohan, Forum Pemred dan ratusan wartawan.

Dalam kesempatan itu, Gubsu mengatakan, selain sebagai kontrol sosial, media massa di Sumut banyak memberikan kontribusi, sumbang saran, ide dan gagasan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam membangun Sumut ke arah yang lebih baik.

"Ini bentuk sinergitas antara media dengan Pemerintah Provinsi. Saya berharap, sinergitas selama ini terus kita tingkatkan dalam upaya membangun opini positif," sebut Gubsu.

Sementara Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, media massa merupakan pilar keempat dalam demokrasi, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. "Di negara maju, media mendapat tempat dalam berbagai bidang. Karena mampu membentuk opini yang baik atau sebaliknya, opini buruk," sebut Yasonna.

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga mengajak media massa di Sumut mensosialisasikan Teks Amnesti (pengampunan pajak) yang kini telah disahkan. "Untuk membangun Indonesia yang kuat, investor lokal kita dorong untuk berinvestasi di dalam negeri. Dengan begitu, perekonomian akan tumbuh subur," ujar Yasonna.

Secara khusus, Yasonna Laoly memberikan apresiasi kepada media online karena mampu menyajikan informasi secara cepat dan dapat diakses dengan mudah. "Tetapi ada media yang mencemaskan saat ini. Media Sosial atau Medsos. Ini perlu mendapat perhatian kita bersama, karena tidak mengikuti kaidah jurnalistik," sebut Yasonna.

Sementara Ketua SPS Sumut Parianda Putra Sinik mengatakan, media massa siap bersinergi dengan Pemprov Sumut dalam berbagai bidang, tanpa melupakan peran media sebagai sarana informasi bagi khalayak ramai. "Kalau selama ini peristiwa yang buruk itu menjadi berita yang baik. Kemudian kita balik, kita tulis peristiwa yang baik itu besar-besarnya agar masyarakat tahu," sebut Parianda.

Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pers Sumut Roni Simon menyerahkan buku berjudul "Pers Hukum dan Hak Azasi Manusia" kepada Gubernur Sumut. Usai berbuka puasa, Gubernur Sumut dan wartawan sholat maghrib berjamaah kemudian makan malam bersama.



## SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Menghadiri Buka Puasa Bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut,  
Serikat Perusahaan Pers (SPS), Ikatan Jurnalis Televisi Indoensia (IJTI) Sumut dan Media Online  
Rumah Dinas Gubernur, Minggu 3 Juli 2016





**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH. M.Hum**  
Mendampingi Gubsu Meninjau RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar  
Kota Pematang Siantar, Senin 4 Juli 2016





## GUBSU MINTA MANAJEMEN RSUD DR DJASAMEN SARAGIH PERBAIKI PELAYANAN

Pematang Siantar, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si didampingi Penjabat Walikota, Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum dan Kapolres, AKBP. Dodi Darjanto, S.Ik.MTTA, berkunjung ke Kota Pematangsiantar. Pertama mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Djasamen Saragih di Jalan Sutomo, Kecamatan Siantar Selatan, Senin (4/7). Di RSUD dr.Djasamen, rombongan Gubsu yang diterima Wakil Direktur RSUD, dr Maya Damanik, MARS dan pejabat struktural RSUD lainnya untuk meninjau langsung perkembangan RSUD yang dulunya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu ruangan yang sempat dikunjungi Gubsu adalah Gedung Baru Ruang Haemodialisa dan Ruangan VIP Utama yang ada di Lantai 2. Di ruangan ini, Gubsu melihat langsung sembari mendapatkan penjelasan singkat perkembangan RSUD dari dr Maya Damanik terutama layanan Hemodialisa (HD).

Menurut dr Maya, jumlah pasien HD belakangan ini meningkat signifikan, bahkan penderitanya banyak dari kalangan usia muda yang produktif. "Karena itu, kami terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia peralatan mesin HD dan juga dengan pihak BPJS Kesehatan," katanya.

Gubsu meminta perbaikan manajemen rumah sakit Pemerintah itu dengan harapan agar terus meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang pasien. "Saya lihat kondisi rumah sakit ini sudah semakin baik, apalagi untuk di daerah. Karena itu, saya berharap agar manajemen terus melakukan perbaikan, termasuk para pelayanan medisnya sehingga memberikan suasana nyaman terhadap para pasien," terangnya.



## GUBSU DUKUNG MUSEUM BSA

**Pematang Siantar**, Keberadaan Becak Siantar yang identik dengan sepeda motor BSA (Birmingham Small Arms) mendapat perhatian dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si Sebab, kini jumlah armada BSA di dunia tak banyak. Bahkan di Inggris sendiri sebagai negara pembuat motor ini, konon hanya tinggal 800 unit. Dan di Australia hanya 400 unit lagi. Untuk itu perlu pembangunan museum sebagai upaya menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. Hal itu disampaikan Gubsu di tempat pajangan koleksi BSA, Jalan Nusa Indah, Kecamatan Siantar Utara, Senin (4/7).

Kehadiran Gubsu ini disambut langsung Presiden BOM'S Rizal Ginting didampingi istri dan anaknya. Kepada Gubernur, Rizal Ginting menjelaskan sejarah BSA mulai dari negara pabrik BSA, kedatangannya ke Indonesia, khususnya ke Kota Siantar, termasuk tula duka untuk menjagannya. Pada kesempatan itu, Gubsu dengan rombongan yang hadir, antara Penjabat Walikota Drs. Jumsadi Dumanik, SH, M.Hum, Kapolres AKBP Dodi Darjanto SIK menyempatkan diri berfoto bersama dengan Presiden BOM,S tersebut.

Gubsu mengaku bangga dan memberikan apresiasi kepada Rizal Ginting yang senantiasa mau melestarikan BSA dan beberapa benda bersejarah lain yang keberadaannya hampir jarang ditemukan di dunia. "Dalam rangka kunjungan kerja ke Kota Siantar, saya melihat sejumlah tempat yang memiliki nilai khusus, salah satu yang sangat terkenal adalah Becak Siantar yang menggunakan sepedamotor BSA. Belakangan ini sudah semakin langka, namun kita masih bersyukur karena masih ada yang mengoleksi sejumlah benda-benda bersejarah seperti sepedamotor yang mungkin pernah kita lihat di film-film saat perang dunia kedua tahun 30-an," ucapnya.

Gubernur menegaskan, museum benda bersejarah dan antik tidak bisa lepas dari bagian pemikat wisata dan perkembangan Danau Toba. "Saya memerintahkan kepada Pj Walikota Siantar, agar ini dijadikan sebagai museum yang akan menjadi kebanggaan Kota Siantar, khususnya Sumatera Utara. Apalagi dalam menghadapi Danau Toba yang akan dijadikan sebagai pusat wisata internasional.

Dan ketika tol Kualanamu yang mempunyai koneksi dengan Siantar sudah bisa menjadi sarana untuk membuat wisatawan atau turis berkunjung atau singgah di kota ini, melihat tugu becak, museumnya, kekayaan kulinernya dan tempat menarik lainnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat positif," katanya.

Untuk menjaga berbagai benda sejarah, gubernur mengaku, seharusnya itu merupakan tanggungjawab pemerintah dan langkah yang dilakukan masyarakat sepenuhnya harus didukung. Dalam hal ini ia memerintahkan Pj Walikota Pematangsiantar untuk memikirkan pembangunan museum, salah satunya adalah memanfaatkan aset bangunan pemerintah itu sendiri.

"Saya minta pak Pj Walikota untuk memanfaatkan aset pemerintah. Saya melihat ada banyak kantor-kantor pemerintah yang walaupun itu punya Pemkab Simalungun, tetapi itu sangat baik untuk dipinjam-pakai, dijadikan sebagai museum Becak Siantar maupun museum benda-benda yang dapat dipakai mengenang sejarah masa-masa lalu. Banyak yang perlu dikenang di Kota Siantar ini. Mungkin itu bisa dimanfaatkan," terangnya.



**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**

Mendampingi Gubsu Berkunjung ke Museum Becak Birmingham Small Army (BSA) Kota Pematang Siantar  
Kota Pematang Siantar, Senin 4 Juli 2016







**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**  
Melaksanakan Sholat Isya Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat  
Mesjid Darul Aman Kota Pematang Siantar, Senin 4 juli 2016







**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**

Halal Bi Halal Idul Fitri 1437 H

Rumah Dinas Gubernur, Kamis 7 Juli 2016





## RUMAH DINAS GUBSU DIPENUHI WARGA

**Medan,** Masyarakat Kota Medan dan sekitarnya memenuhi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si yang menggelar Open House Idul Fitri 2016 pada Kamis (7/7). Tamu yang datang dari berbagai kalangan, bertemu dan bersalaman dengan Erry dan istri dalam tradisi Lebaran tersebut.

Gelaran open house untuk masyarakat umum itu berlangsung sejak pagi hingga sore pukul 17.00 WIB. Secara bergantian hadir tamu-tamu dari kalangan masyarakat umum, bupati/wali kota se-Sumatera Utara (Sumut), unsur SKPD, tokoh organisasi masyarakat dan keagamaan. Untuk menampung ratusan tamu, penyelenggara menyiapkan tenda besar di samping rumah dinas serta aneka kuliner yang bisa dinikmati sepuasnya. "Kegiatan ini merupakan tradisi yang diselenggarakan pada Hari Raya Idul Fitri. Gubernur Sumut meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan masyarakat," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga di sela-sela acara.

Sementara Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengaku senang dengan antusiasme warga yang hadir ke rumah dinas walaupun dia harus terus-menerus berdiri dari pagi sampai sore menyambut tamu. Momentum open house setiap Lebaran, terbilang spesial karena merupakan kesempatan untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan.

"Saya senang walaupun dari pagi berdiri terus, sampai pinggang mau patah rasanya," ujar Gubsu berkelakar kepada wartawan. Dalam kesempatan itu, Erry menyampaikan rasa syukurnya karena suasana menjelang dan saat merayakan Hari Raya Idul Fitri di Sumut, berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Dia memberi apresiasi kepada aparat keamanan dan semua pihak yang sudah bekerja keras untuk kelancaran pelaksanaan Lebaran di Sumut. "Lalu lintas tidak terlalu macet, harga-harga sembako juga tidak terlalu melambung. Sampai hari ini masih lancar. Alhamdulillah," kata Gubsu. Sehari sebelumnya, rumah dinas Gubernur Sumut juga kedatangan sejumlah tamu pejabat.

Tampak hadir rombongan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol Raden Winarso, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto, beserta jajaran Polda Sumut. Selain itu, Kasdam I/BB Brigjen TNI Widagdo Hendro Sukoco dan jajaran Kodam I/BB, rombongan Pangkosekhanudnas III Kol Pnb Jemi Trisonjaya, rombongan Danlanud Soewondo Kol Pnb Arifien Sjahrir, rombongan Danlantamali Belawan, dan tokoh masyarakat yang datang secara bergantian.

Dengan bus milik Pemprov Sumut, Gubsu dan rombongan mengunjungi kediaman Kapolda Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso, Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin, Danlanud Kol Pnb Arifien Sjahrir, Pangkosekhanudnas III Kol Pnb Jemi Trisonjaya dan Kasdam I/BB Brigjen TNI Widagdo Hendro Sukoco. Di setiap kediaman pejabat yang dikunjungi, Gubernur Sumut dan rombongan bersilaturahmi dan saling tukar informasi tentang berbagai hal pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Gubsu mengungkapkan, momentum Hari Idul Fitri merupakan sarana silaturahmi untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat sehingga tidak ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat juga akan terdorong meningkatkan partisipasi dalam pembangunan dengan menyukseskan program-program pembangunan yang tengah dijalankan.

Menurut dia, membangun kebersamaan harus terus dilakukan sebagai modal sekaligus energi besar dalam menghadapi berbagai dinamika maupun tantangan pembangunan ke depan. "Jadi kebersamaan ini menjadi modal utama bagi kita untuk menjadikan Sumut lebih baik lagi ke depan," ujarnya.

## GUBSU GELAR HALAL BI HALAL DI RUMAH DINAS



Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengadakan Halal bi Halal bersama seluruh PNS Pemprovsum di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman, Senin (11/7). Tampak hadir dalam acara Halal bi Halal ketua TP PKK Provsum, Hj. Evi Diana Erry Nuradi, Sekodprovsum, Hasban Ritonga, dan ketua Dharmawanita Provsum, Para Staf Ahli Gubsu, Para Asisten, Seluruh Kepala SKPD dan PNS jajaran Pemprovsum.

Dalam kegiatan itu, Gubsu mengharapkan kepada seluruh PNS Pemprovsum untuk meningkatkan kinerja dan kekompakan menuju Sumut lebih baik di masa mendatang. Karena PNS itu harus menyadari tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk melayani masyarakat. "Bila kita sudah menyadari tugas pokok dan fungsi kita, mudah-mudahan kita akan meningkatkan tugas-tugas kita sebagai pelayan di bidang Pemerintah, pembangunan maupun tugas-tugas kemasyarakatan," ucapnya di Rumah Dinas Gubsu.





**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
 Menghadiri Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1437 H bersama PNS Pemprov  
 Rumah Dinas Gubsu, Senin 11 Juli 2016





**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
Menghadiri Kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) RI  
Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubsu, Kamis 21 Juli 2016





## RAPAT EVALUASI PERSIAPAN LOMBA PERTA



Medan, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Diskominfo Provsu Afini, SE didampingi oleh Kepala Seksi Komunikasi sosial Diskominfo Provsu Dra. Efi Zarnita, M.Si memimpin rapat evaluasi kesiapan lomba tradisional pertunjukan rakyat Group Teater Deli Company yang akan tampil di ajang Pekan Informasi nasional di Kutai mendatang berlangsung di aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu Jumat (22/7).



**KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE**

Memimpin Rapat Evaluasi Kesiapan Lomba Pertunjukan Rakyat *Group Deli Company* yang akan Tampil di Ajang Pekan Informasi Nasional di Kutai  
Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Jumat 22 Juli 2016





## SEKRETARIS DINAS KOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Menerima Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka Meninjau Langsung Bidang Pendidikan Kejuruan  
Ruang Kenanga Kantor Gubsu, Medan 22 Juli 2016





## 2.067 SEKOLAH MENENGAH ATAS DIALIHKAN KE PEMPROVSU

**Medan,** Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut akan mengalihkan 2.067 sekolah menengah atas di provinsi menjadi urusan Pemprovsu. Dari jumlah sekolah tersebut, terdapat 600.983 siswa. "Hal ini merupakan amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014", ujar Sekda Provsu saat menerima kunjungan kerja spesifik komisi X DPR RI ke Sumut, di ruang rapat Beringin Lt 8 Kantor Gubsu Jln Dipenegoro Medan, Jumat (22/7/2016).

Selain mengalihkan 2.067 sekolah menengah atas, lanjut Sekda Provsu, Pemprovsu juga mengalihkan 56 sekolah pendidikan khusus, dengan jumlah siswa sebanyak 3.594 orang. "Jadi, total aparatur sipil negara dari dunia pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemprovsu sebanyak 19.637 orang", jelasnya.

Menjawab tuntutan undang-undang tersebut, lanjutnya, Pemprovsu sudah merencanakan alokasi anggaran tahun 2017 memenuhi anggaran pendapatan belanja (APBD) sebanyak Rp 1,6 triliun. "Tujuan dari pengalihan tersebut guna pelayanan akses pendidikan, pemeratan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Ini mengingat kompetisi pasat tenaga kerja baik lokal, regional ataupun global membutuhkan kompetensi yang berlisensi melalui pendidikan", ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Provsu mengharapkan Komisi X untuk terus memberi dukungan pendidikan, dengan memperoleh data dan informasi guru honorer (k2) dan program penyelesaiannya, serta memperoleh data dan informasi permasalahan P4TK dan LPMP. Pada kunker DPR RI tersebut, Sekda Provsu di dampingi Asisten III, Asisten IV, Plh Kadisdik Sumut serta sejumlah pejabat pemprovsu lainnya. Sedangkan rombongan anggota DPR RI, dipimpin wakil ketua komisi X Sutan Adil Hendri bersama anggota lainnya diantaranya Hj Reni Marlinawati, Ir Sri Meliyana, Hj Latifah Shohib, H Defi Wahidi, Dwita Ria Gunadi, Ridwan Hidayat dan Yasti Soepredjo Mokoagow.



## RAKOR BBPPKI DENGAN DISKOMINFO PROVSU MENUJU SMART PROVINCE

**Medan,** Terkait dengan kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Electronic Government (E-Government) menuju Smart Province Sumatera Utara, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfo Provsu, Jumat (22/7).

Empat orang peneliti BBPPKI yang terdiri dari Abdul Rahman Harahap, Arifuddin, Oktolina Simatupang dan Meilima D Ginting memberikan contoh kuesioner penelitian kepada Kabid Aplikasi dan Telematika Dinas Kominfo Provsu Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si untuk dikoreksi bersama.

Tujuan penelitian ini selain untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan Electronic Government (E-Government) menuju Smart Province Sumatera Utara juga untuk mengetahui rekomendasi yang diperlukan sebagai langkah perbaikan Aparatur Pemerintah Daerah dalam penerapan E-Government menuju Smart Province di Sumatera Utara.

Kuesioner penelitian ini nantinya akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota untuk diisi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan pihak yang terkait di bidang Komunikasi dan Informatika dalam memberikan dan memenuhi informasi kebutuhan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.







**KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si**

Memimpin Rapat Koordinasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Menuju *Smart Province*

Ruang Rapat Kadis Kominfo Provsu, Jumat 22 Juli 2016









# AGUSTUS

## SUMUT, SATU-SATUNYA TPID PROVINSI YANG RAIH EMPAT KALI PENGHARGAAN

Jakarta, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara kembali menyabet predikat TPID terbaik kategori Provinsi Kawasan Sumatera mengungguli sembilan provinsi lainnya. Penghargaan itu diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Ketua TPID Sumut yaitu Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH pada Rapat Koordinasi Nasional ke Tujuh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2016 (Rakornas VII TPID Tahun 2016) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Dengan penghargaan tersebut, TPID Sumut menjadi satu-satunya TPID Provinsi yang mendapat penghargaan terbanyak yaitu empat kali pada tahun kerja 2011, 2012, 2014 dan 2015. Turut hadir menyaksikan penyerahan penghargaan Wakil Ketua TPID Sumut yaitu Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Difi A Johansyah dan Sekretaris TPID Sumut, Plt Kepala Biro Perekonomian Hj Elidawati Hasibuan, SE, M.AP. Rakornas TPID tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi para menteri Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan para kepala daerah serta gubernur dari 34 provinsi.

Ketua TPID Sumut Hasban Ritonga mengatakan keberhasilan TPID Sumatera Utara ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar Pemprov Sumut, Bank Indonesia dan Bulog serta Pemkab/Pemko se Sumut dalam mengendalikan inflasi dibawah pembinaan Gubernur Sumut Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. "TPID Sumut berhasil meredam laju inflasi Tahun 2015 sebesar 3,24 (yoy) di bawah inflasi nasional sebesar 3,35% (yoy). Realisasi itu juga mencapai rentang target yang ditentukan pemerintah sebesar  $4\% \pm 1\%$ ," jelas Sekda didampingi Difi A Johansyah dan Sekretaris TPID Sumut, Hj Elidawati Hasibuan.

Menurut Difi A Johansyah, selain pencapaian target inflasi, TPID Sumut dinilai memiliki program khusus yang berhasil secara efektif mengendalikan harga. Pada tahun 2015 TPID Sumut melakukan sinergi lintas instansi untuk perbaikan tataniaga cabai merah. Secara konkrit, TPID Sumut melakukan intervensi harga di tingkat petani dengan melakukan pembelian cabai merah di atas harga pasar yang jatuh akibat panen raya. "Selain menyelamatkan petani, TPID Sumut memiliki pasokan cabai merah yang digunakan untuk pengendalian harga melalui operasi pasar ketika harga melonjak. Dengan program ini, TPID Sumut berhasil menstabilkan harga baik di pihak petani dan masyarakat umum," tambah Elidawati.

Seluruh kategori penghargaan terbagi dalam tiga kawasan, yaitu Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Dari 33 TPID Provinsi se Indonesia, TPID Sumut bersama TPID Jawa Tengah dan TPID Bali menjadi TPID Provinsi terbaik. Selain kenerhasilan TPID Sumut, TPID Kota Medan dan TPID Kota Tebing Tinggi yang berada di Provinsi Sumut juga menyabet penghargaan. TPID terinovatif dimenangkan TPID Medan bersama TPID Surakarta dan TPID Balikpapan.

Sementara TPID berprestasi diberikan kepada TPID Tebing Tinggi, TPID Lumajang dan TPID Polewali Mandar. Satu-satunya kategori yang tidak dimenangkan Sumut adalah TPID Kota terbaik yang diberikan kepada TPID Padang, TPID Jember dan TPID Samarinda. Dengan demikian tiga dari empat kategori penghargaan untuk kawasan Sumatera diterima oleh TPID Sumut. Setelah pengumuman TPID terbaik, Presiden secara langsung memimpin Rakornas yang mengangkat tema "Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan".

Presiden menyampaikan empat kunci pengendalian inflasi di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Pertama, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan intervensi bila diperlukan. Kedua, TPID bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan melakukan pemeriksaan pasokan kebutuhan pokok di gudang penyimpanan. Ketiga, memastikan kelancaran jalur transportasi bahan pokok. Keempat, menjaga distribusi barang berjalan lancar.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu tumpuan perekonomian. Kepala Daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga pencapaian inflasi yang terjaga di bawah pertumbuhan ekonomi.





**KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE**  
 Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID Tahun 2016  
 Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016







**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**

Menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) se-Sumut  
Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut, Selasa 9 Agustus 2016



## GUBSU HADIRI ACARA MONITORING DAN EVALUASI TP4D SE-WILAYAH SUMATERA UTARA

**Medan**, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengapresiasi Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi TP4D se-Wilayah Sumatera Utara yang dilaksanakan. Karena menurut Gubsu kegiatan ini merupakan masukan yang bermanfaat bagi seluruh pemerintah daerah se Sumatera Utara. Pertemuan ini, lanjut Gubsu juga merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan serta suatu upaya untuk memperoleh pemahaman yang terintegralistik dan komprehensif tentang konsep pelaksanaan pendampingan hukum yang dilakukan oleh TP4D dalam percepatan pembangunan di daerah masing-masing.

Sehingga memperoleh kesamaan persepsi dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Utara yang diakselerasikan dalam program-program strategis pembangunan dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintah.

"Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr Bambang Sugeng Rukmono dan segenap jajarannya atas pelaksanaan pertemuan ini. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang pertama dihadiri bupati dan walikota yang terbanyak," sebut Gubsu pada acara monitoring dan evaluasi TP4D se-Wilayah Sumatera Utara di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Yang dihadiri seluruh jajaran Kejatisu serta para bupati dan walikota se Sumatera Utara.

Pada kesempatan itu Gubsu juga mengajak semua pihak untuk membuka cakrawala pemikiran tentang konsep dan upaya-upaya yang harus dilakukan kedepan sebagai langkah implementatif pendampingan oleh Hukum oleh TP4D sebagaimana diamanatkan instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena pada tahun-tahun terakhir isu korupsi menjadi isu yang meluas.

Walaupun lanjut Gubsu bahwa hal tersebut sangat pelik dan berat. Namun Gubsu meyakini dengan koordinasi dan kerjasama yang baik serta berfikir secara jernih dan jujur, menyikapi kondisi ini secara arif dan bijaksana, maksud dan tujuan tugas-tugas TP4D dalam pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD dapat terlaksana dengan baik.

"Monitoring dan evaluasi ini menjadi sangat strategis dan urgen mengingat bahwa pada hakikatnya pertemuan ini merupakan komitmen tentang prinsip pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas," ujar Gubsu lagi. Sebagai wujud komitmen dan langkah antisipatif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi berupaya konsisten dengan prinsip perencanaan dan kebijakan yang akurat pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Salah satu upaya yang dilakukan lanjut Gubsu yaitu Menyusun rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah provinsi Sumatera Utara yang merupakan aksi daerah dalam pemberantasan korupsi secara terpadu dan bekesinambungan dengan fokus pada 9 kelompok kerja yaitu, perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah, pengadaan barang dan jasa, perijinan pelayanan terpadu, manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset daerah, penguatan dan efektifitas partisipasi publik dan perda tata ruang.

"Diharapkan rencana aksi ini menjadi pedoman bagi aparat pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota diharapkan melakukan pengatur lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah," kata Gubsu.

Sementara Kajatisu Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH, MH mengatakan bahwa Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara siap mendampingi Pelaksanaan TP4D dan menyatakan keinginan untuk bisa ikut membangun bangsa dan negara ini. Karena lanjutnya selama ini hubungan silaturahmi antara kejaksaan tinggi dengan instansi pemerintah kelihatannya kurang harmonis.

Mungkin akibat satu merasa diawasi dan yang satu sebagai pengawas. Seolah olah ada jarak. "Oleh karenanya kedepannya kita ingin memperbaiki hubungan ini dan kami siap kapan saja bapak perlukan agar kami dapat bersama-sama ikut dalam proses pembangunan bangsa dan negara khususnya provinsi Sumatera Utara," sebutnya.

## 22 SEPTEMBER 2016 BATAS AKHIR PENYESUAIAN JASTIP

**Medan,** Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32 tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggara Pos, istilah "Penyelenggaraan Jasa Titipan" telah diubah menjadi "Penyelenggara Pos". Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) bertempat di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Rabu (10/8).

Dalam pertemuan tersebut Christ Polin selaku perwakilan Kemkominfo mengatakan, setiap jasa penitipan wajib melakukan penyesuaian perizinan menjadi penyelenggara pos, karena dengan keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32 tahun 2014 nomenklatur jasa penitipan berubah menjadi penyelenggara pos dan bagi penyelenggara pos yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah agar diberikan kemudahan dalam mendapatkan izin pembaharuan penyelenggaraan pos.

Lebih lanjut Christ Polin mengatakan total penyelenggara jasa titipan di Sumatera Utara ini berjumlah 21 penyelenggara. Penyelenggara Jasa Titipan yang sudah melakukan izin ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sejumlah 11 Penyelenggara. Sisanya ada 10 Penyelenggara Jasa Titipan yang belum melakukan penyesuaian izin menjadi Penyelenggara Pos. "Kita harapkan sebelum tanggal 22 September 2016 sudah melakukan penyesuaian izin, karena kalau tidak melakukan penyesuaian izin dan penyelenggara jasa titipan menjadi Penyelenggara pos maka izinnya akan dicabut secara otomatis" ujarnya.

Sementara itu Pih Kadis Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE mengatakan melalui pertemuan ini diharapkan peningkatan pelayanan publik melalui penyesuaian izin penyelenggara pos dari penyelenggara jasa penitipan menjadi penyelenggara pos dapat mendorong iklim penyelenggara pos di Sumatera Utara menjadi lebih baik. Pertemuan tersebut juga dihadiri Pejabat Struktural Eselon III dan IV jajaran Dinas Kominfo Provsu, Perwakilan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provsu.







**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
 Memimpin Rapat Bersama Asperindo tentang Penyesuaian Nomenklatur Jasa Titipan  
 Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Rabu 10 Agustus 2016



## GUBSU BUKA PEKAN DAERAH KTNA DI BATU BARA

**Batubara,** Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si secara resmi membuka Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang digelar di Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, Kamis (11/8). Gubsu mengatakan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) bertujuan untuk meningkatkan kekompakkan dan kesolidan antara sesama petani-nelayan Sumatera Utara.

Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pembangunan bidang pertanian-perikanan dan kehutanan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang teknologi untuk menghadapi Pekan Nasional yang akan diselenggarakan di Banda Aceh mendatang. "Kalau diperkenankan, Sumatera Utara bersedia menjadi tuan rumah KTNA berikutnya, untuk itu kita meminta dukungan kepada Ketua KTNA Nasional serta pihak terkait untuk dapat menjadikan Sumatera Utara sebagai tuan rumah KTNA mendatang," ucapnya.

Di tahun 2016 ini merupakan tahun ke 2 kita melaksanakan program swasembada pangan terutama padi, jagung dan kedelai yang telah dicanangkan Pemerintah untuk waktu 3 tahun mulai tahun 2015 sampai 2017. Berbagai langkah dan upaya telah dilaksanakan baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota mulai dari perbaikan jaringan irigasi, pemberian bantuan bibit dan pupuk maupun penguatan pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh bersama unsur TNI, Babinsa serta Mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi.

"dalam pelaksanaan telah terjadi sinergi dan koordinasi yang harmonis dari seluruh instansi terkait untuk itu sinergi dan koordinasi yang harmonis yang telah dibangun agar dapat dijaga dan ditumbuh kembangkan untuk menyukseskan program yang telah dicanangkan Pemerintah," ujarnya.

Bupati Kabupaten Batubara OK Arya Zulkarnain mengatakan Pekan Daerah tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 merupakan wahana bagi petani-nelayan untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar menukar informasi, apresiasi kemitraan dan promosi hasil pertanian. Sekaligus sebagai ajang silaturahmi petani-nelayan se-Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu, saya berharap kepada peserta kiranya dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan diri melalui kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan panitia.

OK Arya berharap pelaksanaan PEDANA tingkat Provinsi Sumatera Utara 2016 dengan tema "melalui PEDANA tahun 2016 di Kabupaten Batubara kita mantapkan kelembagaan tani-nelayan sebagai mitra kerja Pemerintah dalam rangka kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan menuju kesejahteraan petani-nelayan Sumatera Utara" dapat berjalan dengan baik, aman dan sukses.

Sementara Ketua KTNA Nasional Ir. Winarno Tohir menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pengurus Kelompok KTNA Provinsi Sumatera Utara yang telah bersinergi dengan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. KTNA sebagai mitra kerja Pemerintah, bahu membahu melaksanakan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. saya percaya dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi dari seluruh pengurus kelompok KTNA, Insyaallah berbagai tantangan dan hambatan akan bisa diatasi dan target sasaran pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan ke depan akan dapat tercapai sesuai harapan kita bersama," katanya.

Selain itu, Winarno mengajak kepada seluruh peserta Pekan Daerah KTNA untuk mensukseskan Pekan Nasional (Penas) XV yang akan diselenggarakan di Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh (6-11/5) tahun 2017 mendatang. Penas merupakan perhelatan akbar yang dimanfaatkan sebagai ajang pertemuan antara sesama petani -nelayan dari seluruh pelosok Indonesia, sekaligus wadah unjuk pencapaian kreatifitas peta-nelayan yang menjadi tolak ukur keberhasilan petani nelayan.

Dengan diselenggarakannya Penas diharapkan petani-nelayan yang hadir saling berinteraksi dan bersinergi memanfaatkan teknologi, sumber daya alam pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersedia di daerah masing-masing untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam perbaikan mutu kualitas dan kuantitas usaha taninya sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tani-nelayan.





**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
Menghadiri Pembukaan Pekan Daerah (PEDA) Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2016  
Batubara, Kamis 11 Agustus 2016





**KABID POSTEL GELORA VIVA SINULINGGA, SE, MM**  
Membuka Acara *Coffee Morning* dalam rangka HUT RI ke-71 Tahun 2016  
Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Kamis 11 Agustus 2016





## MEMAHAMI SIFAT PLURALISME UNTUK TERCIPTANYA RASA PERSAUDARAAN

Medan, Setiap Tahun kita merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang pada Tahun 2016 ini akan diperingati pada hari Rabu tanggal 17 Agustus untuk menyambut HUT RI Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Diskominfo Provsu) mengadakan coffee morning bertemakan " Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup dalam ke-Bhinekaan untuk Kokohkan Persatuan NKRI" yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, Fungsional, Staf di Lingkungan Diskominfo Provsu serta mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Sumatera Utara, Kamis (11/8).

Acara tersebut dibuka oleh Kabid Postel Gelora Viva Sinulingga, SE, MM. Dalam kata sambutan Kadis Kominfo Provsu yang dibacakan Kabid Postel, tujuan acara ini adalah sebagai upaya untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi dan persaudaraan diantara sesama, selain itu untuk menyatukan pandangan dalam meningkatkan pembinaan dan pematapan kerukunan hidup antar umat beragama serta sebagai media dialog antara elemen masyarakat di Sumatera Utara, untuk memahami sifat pluralisme, saling membantu dan bekerja sama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dr. H. Maratua Simanjuntak sebagai narasumber pertama menjelaskan bahwa sifat pluralisme adalah sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama dan budaya. Sedangkan pluralisme agama ialah setiap pemeluk agama dituntut mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam ke-bhinekaan.



Beliau juga menyinggung masalah konflik antara masyarakat Islam dengan masyarakat Konghucu yang baru-baru ini terjadi di Tanjung Balai untuk mencegah konflik ini tidak terulang lagi dibutuhkan toleransi, rasa persaudaraan antar umat beragama dan moderasi yang senantiasa menjadi pedoman dalam berinteraksi.

Selanjutnya narasumber kedua dari Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Dra. Hj. Nina Karina, M.SP menyampaikan "semangat dan nilai-nilai perjuangan 45 merupakan akumulasi dari nilai perjuangan bangsa yang tumbuh dari zaman ke zaman, nilai perjuangan ini lahir sebagai jawaban dari generasi perintis kemerdekaan dan generasi angkatan 45 terhadap tantangan menghadapi kolonialis dan menjadi landasan kekuatan dalam mewujudkan cinta bangsa dan tanah air".

Beliau berharap kepada generasi muda harus percaya kepada Tuhan yang maha ESA, menjaga persatuan dan kesatuan dan meningkatkan etos kerja serta percaya diri kepada hari depan yang gemilang dari bangsa Indonesia. Khusus pada saat ini : JAUHI NARKOBA. (PIP)





**KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE**  
 Menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provsu  
 Gedung Bank Indonesia Medan, Senin 15 Agustus 2016



## TEKAN INFLASI, GUBSU MINTA DINAS PERTANIAN PETAKAN PRODUKSI PANGAN



Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si meminta Dinas Pertanian Sumatera Utara memetakan kondisi ketersediaan dan produksi bahan pangan di Sumatera Utara. Pemetaan dimaksud untuk memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan bahan pangan pada saat musim paceklik maupun musim panen raya.

"Dinas Pertanian harus punya peta terutama komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah, kapan produksi melimpah, kapan paceklik untuk bisa diidentifikasi. Tujuannya agar pasokan ketersediaan bahan pangan stabil sehingga tidak menimbulkan gejolak inflasi," ujar Erry saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara di Kantor Bank Indonesia, Medan, Senin (15/08/2016).

Dalam rapat yang dipimpin Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut dan Aceh Drs. Ahmad Johansyah, dihadiri Asisten Ekbang Provsu Binsar Situmorang, Kepala SKPD Provsu terkait, Kepala BPS Sumut, Kepala Bulog dan mewakili Pemko Medan, Erry meminta agar Dinas pertanian harus bisa mendorong produksi.

Selanjutnya stakeholder hendaknya dapat bekerjasama dan memantau kondisi inflasi yang terjadi dan mengambil langkah antisipasi. Erry pun memberi arahan yang harus dilakukan untuk pengendalian inflasi, diantaranya agar SKPD berkaitan dengan produksi baik pertanian dan peternakan segera berkoordinasi dengan instansi terkait.

"Dinas pertanian harus punya peta kapan produksi melimpah, kapan paceklik untuk bisa diidentifikasi. Hari ini kalau kita tidak dimulai tanaman bawang cabai, nantinya akan ada fluktuasi harga. Kita bisa antisipasi dan bisa kerjasama dengan provinsi lain dengan produk melimpah," ujarnya.

Dijelaskan Erry dari perkembangan enam bulan pertama tahun 2016 ini inflasi terbilang relatif tinggi. Oleh karenanya perlu kerjasama semua pihak baik dari sisi produksi maupun distribusi. "Lakukan rapat dan kunjungan ke peternakan untuk mengatasi persoalan yang ada," kata Gubsu.

Gubsu mengingatkan hal penting lainnya yaitu jalur distribusi. "Jangan sampai petani mendapat sedikit namun harga di pasar tinggi. Distribusi seperti ini yang harus dipotong agar efisien, tambahnya.

Dalam kesempatan itu Erry meminta Dinas Perindag harus bisa mengatasi persoalan tersebut, salah satunya dengan berkordinasi dengan bulog untuk membangun distribusi yang efisien. Demikian juga untuk produk lain seperti gula pasir dan bahan lain yang bisa stabilkan harga.

"Gula dan daging sudah banyak yang masuk. Kita libatkan daerah untuk operasi pasar serentak, karena Sumut bukan hanya Medan saja. Apalagi kalau harga mulai naik, segera koordinasi dengan bulog agar bisa operasi pasar," pinta Gubsu.





## SARASEHAN KEMERDEKAAN DI SMA 6 PEMATANGSIANTAR, KORUPSI DAN NARKOBA JADI SOROTAN PESERTA

Pematang Siantar, Penjabat (Pj) Walikota Pematangsiantar Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum mengatakan, kaum muda selaku generasi penerus harus memiliki jati diri, inovasi dan kreatifitas untuk mampu bersaing dalam kondisi apapun. Wejangan ini disampaikan saat membuka Diskusi Panel dan Sarasehan Dalam Rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71, di Aula SMA Negeri 6 Jalan Viyata Yuda, Selasa (16/8/16).

Kepada ratusan pelajar peserta diskusi ia berpesan, untuk bisa menempatkan diri sebagai peserta didik yang mau belajar dan bekerja keras guna memaknai kemerdekaan. "Sebagai generasi muda yang harus melanjutkan pembangunan di negara ini, tentunya harus punya kompetensi yang baik, terpercaya. Gunakanlah kemajuan teknologi informasi dalam rangka pengembangan pengetahuan dan karakter, bukan untuk hal-hal yang negatif," ujar Jumsadi.

Di samping itu, dalam mengisi kemerdekaan sekaligus menyongsong tahun emas Indonesia di 2045 mendatang, banyak faktor-faktor yang dapat merusak tatanan bangsa ini jika tidak diperangi sejak dini. Antara lain yang paling menonjol menurutnya adalah Narkoba. Peredaran narkoba dan tingkat pengonsumsi yang tidak habis-habisnya, dikhawatirkan akan menghancurkan bangsa ini sehingga bisa saja kembali ke zaman kolonial. "Peredaran narkoba marak saat ini. Bisa gak adek-adek bayangkan, jika semua rakyat Indonesia jadi pengonsumsi narkoba, apa gak teller presiden kita. Ini yang harus diantisipasi, perang pemuda sangat penting," katanya lagi.

Dalam menghadapi era kemajuan teknologi internet saat ini, ia tekankan khususnya para pelajar supaya mengambil sisi positifnya. Dia sedikit bergurau memesankan supaya para anak didik yang punya akun facebook saat membuat status harus yang baik dan membangkitkan semangat. "Jangan lagi buat status yang galau. Jika dirimu tak di sini tentu diriku tak di sana, jangan lagi seperti itu," ucap Pj.Walikota disambut tawa peserta.

Di akhir sambutannya, ia menegaskan memilih SMA Negeri 6 sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini, karena sekolah dimaksud saat ini bisa dikatakan sebagai sekolah tauladan di kota ini, khususnya dalam bidang perawatan lingkungan. "Selamat, sekolah ini baru mendapat plala Adiwiyata Mandiri yang langsung diserahkan oleh wakil presiden RI baru-baru ini. Mudah-mudahan prestasi itu makin meningkat," pungkasnya.

Kegiatan yang digagas Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara ini menghadirkan Nara Sumber, Dra.Corry Purba M.Si (Dosen FKIP Universitas Simalungun) dan Mariaman Naibaho SH (Ketua Ekspone 66/mantan Ketua DPRD Pematangsiantar). Kegiatan yang mengambil tema: "Ayo Kerja dan Kerja Nyata" ini dipandu oleh Moderator Jalatua Hasugian (Pit.Kabag Humas Pemko Pematangsiantar).

Di hadapan puluhan siswa SMA Negeri 6 dan sejumlah guru, termasuk Kepala Sekolah, Drs.M.Akhyar,M.Pd kedua narasumber memaparkan, pentingnya komitmen generasi muda dalam mempersiapkan diri menyongsong masa depan yang lebih cerah. Sebagai mantan politisi yang pernah 23 tahun menjadi anggota DPRD Pematangsiantar, Mariaman Naibaho mengajak para siswa untuk tidak alergi terhadap politik. "Politik merupakan wadah untuk mempersiapkan pemimpin di negara ini. Untuk itu, anak-anak SMA juga perlu mempelajari politik agar paham model pengkaderan calon calon pemimpin,"katanya.

Sementara itu, Corry Purba menekankan perlunya implementasi revolusi mental dalam rangka mewujudkan Kerja Nyata yang diprogramkan Presiden Joko Widodo. Dalam rangka itu, pendidikan karakter sangat menentukan pola pikir generasi bangsa kedepan. "Jangan lagi kalian tiru pola pikir dan kelakuan oknum-oknum penting di republik ini, baik di pusat maupun di daerah yang akhirnya masuk bui karena korupsi. Selain itu, narkoba juga menjadi ancaman bagi kita, khususnya generasi muda. Jauhi dan jangan pernah mencobanya," tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, para siswa tampak berebutan mengajukan pertanyaan maupun kritikan terhadap kondisi bangsa ini, yang mengalami krisis berbagai hal. "Bagaimana mungkin negara kita yang dipenuhi para koruptor, narapidana narkoba dan sebagainya, pantas disebut telah merdeka? Ini harus menjadi perhatian kita bersama," ujar seorang siswa, Aprianto Saragih (kelas XII IPA 3). Siswa lainnya, Tri Agustini (kelas XII IPA 1) juga mengkritik lemahnya sistem hukum akibat perilaku para penegak hukum sendiri yang akhirnya membuat masyarakat tidak percaya. "Sistem hukumnya kah yang salah, atau penegak hukumnya yang tak beres,"gugatnya dengan penuh semangat. Kedua narasumber tampak merespon setiap pertanyaan siswa dengan jawaban yang gampang dipahami oleh siswa.



**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**  
Membuka Diskusi Panel/Sarasehan dalam rangka HUT RI ke-71 Tahun 2016  
SMA Negeri 6 Kota Pematang Siantar, Selasa 16 Agustus 2016







**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
 Memimpin Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-71 Tahun 2016  
 Halaman Kantor Diskominfo Provsu, Rabu 17 Agustus 2016













**DINAS KOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA**  
Mengadakan Perlombaan dalam rangka Kemerdekaan RI ke-71  
Kantor Diskominfo Provsu, Rabu 17 Agustus 2016





**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**  
 Mengikuti Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba  
 Balige, Minggu 21 Agustus 2016





## KARNAVAL KEMERDEKAAN PESONA DANAU TOBA 2016 BERLANGSUNG MERIAH

**Balige,** Kota Balige benar-benar berpesta Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba (KKPDT) 2016 yang dipusatkan di kota itu, 21 Agustus 2016 benar-benar semarak. Seluruh warga Kabupaten Tobasa tumpah ruah di puncak peringatan HUT ke-71 RI yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo itu. Mengenakan "ulos raja" Ragidup Sirara warna gelap dan ornamen putih, orang nomor satu di Tanah Air itu ikut pawai sepanjang 3,5 km.

Di tengah perjalanan, Presiden Jokowi yang memakai baju hitam dan sortoli penutup kepala khas Batak itu juga melempar kaos kepada penonton sambil melambaikan tangan ke kiri dan kanan. Ibu Iriana yang tampil ceria dengan baju merah juga melambaikan tangan dan atas mobil hias berdesain ikan mas dengan sulur-sulur berwarna hitam-merah-putih. Ulos bermotif Tum-Tum yang didesain khusus oleh Edward Hutabarat pun terlihat elegan dan bersahaja.

Arak-arakan budaya yang dipandu Kementerian Pariwisata itu boleh dibilang sukses besar. Acara sukses, pelaksanaan lancar, dan sesuai skenario, serta nyaris sempurna. Semua kontingen, 44 nomor tampil optimal, dilepas di garis start Jalan Tarutung, Patuan Nagari sampai finis di Lapangan Sisingamangaraja, Simpang Sibulele. Semua bergerak lancar membelah lautan manusia yang hampir 100 persen mengenakan identitas ulos. "Ini karnaval sudah standar global, slap go international," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, yang terus mendampingi Presiden Jokowi.

Kedua, selama dua hari kegiatan Pesona Danau Toba, semua tagar yang dilempar ke media sosial langsung menjadi trending topic. Pertama, saat konser Slank, Opie Andaresta, Edo Kondologit, Sammy Simorangkir, Dewa Buana, di Pantor Bebas, Parapat, Simalungun 20 Agustus 2016. Dari #PangungApung, #PesonaDanauToba semuanya naik daun sejak sebelum konser. Sedangkan Karnaval yang disaksikan lebih dari 100 ribu pasang mata di jalur karnaval melambungkan tagar #Balige, #PesonaDanauToba, #KintukMedan, #PulauSamosir. "Selamat, Karnaval Pesona Danau Toba benar-benar go digital dan go global. Gambar, foto-foto dan video pendek yang dibagikan ke media sosial benar-benar atraktif dan kaya angel," papar Arief Yahya.

Sukses ketiga, adalah keberhasilan meyakinkan Presiden Jokowi bahwa destinasi Danau Toba layak dikembangkan lebih cepat dan lebih agresif. Dukungan 3A, Atraksi, Akses, Amenitasnya dari pemerintah itu kunci sukses selanjutnya. "Dan ini sudah terjawab di Ratas, Pak Presiden Joko Widodo memutuskan percepatan akses menuju Danau Toba baik jalan tol dari Kuala Namu-Tebing Tinggi-Pematang Siantar, lalu dilanjutkan ke Parapat. Juga pembangunan infrastruktur di Siantar Airport," ujar Arief yang mengakui tiga hal itu adalah bentuk kesuksesan acara.

Arief pun berterima kasih kepada seluruh panitia pelaksana dan timnya yang sudah mempersiapkan kegiatan KKPDT 2016. Janji Jay Wijayanto, Ketua Panitia Pelaksana KKPDT 2016 benar-benar ditepati. Harus diakui, jika dibandingkan dengan defile Opening Ceremony Olympic Games Rio de Janeiro 2016, KKPDT 2016 tidak kalah. Bahkan lebih atraktif, lebih kuat menghujam, atmosfernya lebih terasa dekat, konsep dan desainnya lebih dramatis.

Koordinator Karnaval, Jay Wijayanto menambahkan, karnaval dari Saposurung hingga Simpang Sibulele memang didesain sebagai festival. Bukan sekadar jalan arak-arakan seperti di Olimpiade. Ada gerak, instrumen, dan bunyi-bunyian, kostum dan pakaian adat, mobil hias, marching band dengan berbagai keunggulan, atraksi budaya seperti piring dan tandok. Sepertinya, tandok yang sebelumnya dijanjikan ditampilkan 700 perempuan berpakaian adat Batak terbukti lebih banyak dari jumlah itu. Tandoknya pun berwarna-warni, bukan hanya padang anyam yang biasa berwarna coklat tua, kini ada yang berwarna pastel, biru muda, merah muda, kuning muda.

Provinsi lain juga tampil atraktif. Dari DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Banten,, Papua, Maluku, dan 7 Kabupaten di sekitar Danau Toba. Presiden Jokowi meminta agar tahun depan karnaval ini jangan berhenti. Tentu, harus sudah dipromosikan jauh hari sebelumnya agar bisa mulai menghasilkan wisatawan mancanegara. "Jangan berhenti sampai di sini Tahun depan harus dilanjutkan lagi," kata Jokowi.



## RAPAT EVALUASI BIDANG POSTEL



Medan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara diwakili Kabid Pos dan Telekomunikasi Dinas Kominfo Provsu memimpin rapat Evaluasi Bidang Postel di ruang rapat Kadis Kominfo Provsu, Kamis (21/8), yang didampingi Kasi Postel Yusran Murad Lubis, SH yang dihadiri Kadis Perhubungan Kominfo Kab. Nias, Camat Kab. Madina, Camat Kab. Paluta, Camat Sipirok, dan perwakilan dari Telkomsel.



**KABID POSTEL DISKOMINFO PROVSU GELORA VIVA SINULINGGA, SE, MM**  
Memimpin Rapat Evaluasi Bidang Pos dan Telekomunikasi (POSTEL) Diskominfo Provsu  
Ruang Rapat Diskominfo, Kamis 25 Agustus 2016





**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**  
Menghadiri Peringatan Dies Natalis ke-64 Universitas Sumatera Utara Tahun 2016  
Auditorium USU, Sabtu 27 Agustus 2016















**SEPTEMBER**





**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
 Menerima Audiensi Surat Kabar "CENTRAL"  
 Ruang Kerja Sekretaris Diskominfo Provsu, Kamis 1 September 2016











**Plh. KADIS KOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA H. M. AYUB, SE**

Manghadiri Rapat Koordinasi bersama Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  
Ruang Beringin Kantor Gubsu, Jumat 2 September 2016





## KPK – PEMPROVSU TINDAKLANJUTI PENCAPAIAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI



Medan, Sepekan ini, Senin-Jumat (5-9/9) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tindaklanjut monitoring pencapaian Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dijadwalkan KPK melakukan evaluasi terhadap progress 9 poin yang tercantum dalam rencana aksi.

Kegiatan diawali dengan entry meeting bersama Sekretaris Daerah Provsu Hasban Ritonga dan Asisten IV, M. Ntrius, yang menjadi ketua koorsupgah Korupsi KPK di Sumut, Aldiansyah M Nasution dan Regional KPK Tri Gamarefa, Tomi Murtomo, Azril Zah di Ruang Kerja Sekda Kantor Gubsu, Senin (5/9).

Dalam kesempatan ini Sekda Hasban Ritonga kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan 9 poin yang tercantum dalam rencana aksi yang tercantum dalam Keputusan Gubsu tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 yang dikeluarkan pada 4 Mei 2016.

Kesembilan poin itu adalah penerapan e-government pada bidang perencanaan, penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu rencana aksi juga memuat rencana perbaikan manajemen SDM, penguatan peran Inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan asset daerah, Perda RTRW Sumut dan partisipasi publik.

Hasban Ritonga menjelaskan berbagai progress yang sudah dilaksanakan diantaranya telah dikeluarkan Pergub tentang kewajiban penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pergub mengenai Gratifikasi.

Selain itu, Hasil dari pembelajaran ke Pemko Surabaya pihaknya tengah mengembangkan berbagai aplikasi e-Government untuk dapat diterapkan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Saat ini pembangunan aplikasi terus dikerjakan, masih perlu penyempurnaan," jelas hasban.

Sementara itu, Aldiansyah mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk yang pertama menjalin kerjasama dengan KPK dalam kegiatan koordinasi untuk dapat diterapkan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. "Saat ini pembangunan aplikasi terus dikerjakan, masih perlu penyempurnaan," jelas hasban.

Sementara itu, Aldiansyah mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk yang pertama menjalin kerjasama dengan KPK dalam kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Sumut, selanjutnya, juga menjadi Provinsi yang pertama melakukan MoU dengan Surabaya terkait penerapan e-government. "Kami berharap ini berhasil. Kalau Sumut berhasil, maka Sumut akan menjadi contoh bagi daerah lain," tutup Aldiansyah.







**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
Entry Meeting Bersama Tim Monitoring Pencapaian Rencana Aksi di Provinsi Sumatera Utara  
Ruang Kerja Sekda Provsu, Senin 5 September 2016



## CEGAH KORUPSI, KPK LATIH KEPALA SKPD PROVINSI SUMUT DAN PIMPINAN DEWAN

**Medan,** Dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan unsur pimpinan dewan mendapat pelatihan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/9) di Hotel Grand Serela Medan. Kegiatan bertajuk Training of Trainer Tunas, Sistem dan Komite Integritas ini berlangsung selama tiga hari. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Sekda Provsu H. Hasban Ritonga. Turut hadir dalam acara pembukaan Ketua Komisi C DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga, Asisten IV yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provsu H. M Fitriyus dan Tim KPK yang terdiri atas Asep Kherullah dan Anto Ikayadi.

Hasban mengatakan melalui TOT, para kepala SKPD diharapkan lebih memahami dan mendalami mengenai korupsi sehingga para pemangku kebijakan dapat melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tepat dalam upaya pencegahan korupsi. Selain itu, para Kepala SKPD dan pimpinan dewan diharapkan menjadi pionir dan penggerak upaya-upaya pencegahan korupsi dan menularkan kepada pejabat dan staf di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara. "Saya mengimbau agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan sebaik-baiknya," imbuhasban. Dia juga mengungkapkan apresiasi kepada KPK yang telah memfasilitasi acara TOT dimaksud.

TOT bertujuan membentuk integritas para pemegang jabatan strategis agar dapat memberi keteladanan dan membangun sistem integritas di lingkungan kerjanya. Para peserta TOT diharapkan membentuk komite integritas, mencetak para trainer tunas integritas, serta menjaga dan mengembangkan integritas organisasi secara berkelanjutan.

Sementara itu, H.M Fitriyus menjelaskan upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara yang difasilitasi KPK telah melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari penandatanganan komitmen bersama Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemko se Sumut atas pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi, penyusunan rencana aksi program korupsi terintegrasi, sosialisasi dan TOT Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), penetapan Pergub tentang Pengendalian Gratifikasi dan SK Gubsu tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dalam pekan ini secara bersamaan juga dilaksanakan serangkaian kegiatan berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi yaitu Bimbingan Teknis Unit Pengendalian Gratifikasi, Penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pemprovsu/ Pemkab/Pemko se Sumut pada Rabu (7/9) dan Workshop Best Practise.





**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**  
Menghadiri *Training Of Trainer (TOT)* Sistem dan Komite Integritas Kepala SKPD Provsu  
Hotel Grand Serela Medan, Selasa 6 September 2016







**KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si**  
Menghadiri Evaluasi Progres Rencana Aksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Ruang Rapat Melati Kantor Gubsu, Selasa 6 September 2016









## PEMROV SUMUT TANDATANGANI KOMITMEN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saksikan penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi oleh Pemrov, Pemkab dan Pemko se-Sumut. Penandatanganan ini dilakukan di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu (07/09/2016).

"Kegiatan ini merupakan bentuk pencegahan tindak gratifikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kalau sebelumnya di Pemrov Sumut kali kita kembangkan ke pemerintah daerah kabupaten dan kota. Penandatanganan ini dilakukan cepat, jadi aksi dilapangan juga harus cepat," ujar Deputy Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Lebih lanjut dikatakan Pahala Nainggolan selama setahun belakang ini pihaknya sudah menepatkan sejumlah anggotanya dalam pencegahan dan pengawasan di Sumut. Hal ini dikarenakan Sumut merupakan salah satu daerah yang menjadi pengawasan kita, maka besar harapan kita kalau tindakan korupsi atau sejenisnya bisa terminimalisir meski tak bisa secepatnya hilang.

Untuk mendukung komitmen pemberantasan Korupsi lanjut Pahala peran masyarakat sangat strategis dalam menyukseskan penerapan program pengendalian gratifikasi. "Selain internal Pemda, masyarakat juga didorong untuk tidak memberi. Budaya non gratifikasi perlu didorong terus," ujarnya lagi.

Dikatakannya, pengendalian gratifikasi adalah pencegahan dari tidak korupsi. Menurut Pahala, melihat suatu daerah terindikasi marak korupsi dapat dilihat dari pelayanan publik yang diberikan. Oleh karena itu, salah satu langkah pencegahan korupsi di Sumut menurut Pahala dapat dilakukan dengan pengendalian gratifikasi.



"Kalau masih banyak praktik suap, berarti masih banyak korupsinya. Sumut dapat menjadi contoh daerah yang memberikan pelayanan public tanpa gratifikasi. Itu saja langkah awal, tidak usah jauh-jauh," jelasnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengatakan aksi ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumut. Rencana aksi ini memuat 9 poin, yang salah satunya rencana aksi adalah manajemen SDM termasuk gratifikasi. Permasalahan yang terjadi di Sumut belum adanya mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi. "Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi RI merekomendasikan agar Pemprovsumu menciptakan mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi," papar Gubsu.

Melalui komitmen itu, targetnya adalah segera ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang pengendalian gratifikasi dan keputusan kepala daerah tentang unit pengendalian gratifikasi. Pemerintah Provinsi Sumut sendiri sudah menerbitkan Pergub dan SK dimaksud.

Lebih lanjut Erry menyakini Pemkab dan Pemko se Sumut telah menindaklanjuti hal yang sama melalui peraturan dan keputusan kepala daerah masing-masing. "Dengan komitmen ini saya yakin tindakan korupsi maupun gratifikasi di Sumut bisa diminimalisir," jelas Erry sembari mengatakan masih adanya imej kalau Sumut sebagai provinsi korupsi.



## SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Meenghadiri Penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah  
Provinsi, Kabupaten, Kota di Sumut oleh KPK RI  
Ruang Martabe Kantor Gubsu, Rabu 7 September 2016







**PIh. KADIS KOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
 Membuka *Coffee Morning* dalam rangka Menyambut Hari Raya Idul Adha 1437 H  
 Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Kamis 8 September 2016





## PENERAPAN ASPEK KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM PELAKSANAAN QURBAN



Medan, Dalam menyambut Idul Adha 1437 Hijriah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Diskominfo Provsu) menyelenggarakan acara coffee morning dengan tema "Dengan semangat Idul Adha 1437 H kita tingkatkan solidaritas semangat kesadaran sosial ditengah-tengah masyarakat Sumatera Utara" acara tersebut diselenggarakan di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Kamis (8/9).

Bertujuan menyadarkan kita semangat yang terkandung dalam Idul Adha adalah pentingnya semangat berqurban, semangat berbagi, dan semangat solidaritas seiring berkurangnya semangat sosialisasi di tengah-tengah masyarakat akibat virus materialisme yang dibawa arus globalisasi.

Selaku narasumber yaitu MUI Provsu Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA menyampaikan bahwa umat islam memiliki dua hari raya besar yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, latar belakang kedua hari raya ini berbeda hari raya Idul Fitri ditandai dengan berpuasa penuh dalam sebulan yaitu pada bulan suci ramadhan sedangkan hari raya Idul Adha ditandai dengan adanya puasa sunnah 10 hari, 3 hari dan 1 hari sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Adha.

Idul Adha ini ditandai juga dengan adanya berqurban (menyembelih hewan) dalam salah satu hadits Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berqurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami. Maka bagi yang mampu diharuskanlah padanya untuk berqurban. Beliau juga berharap agar daging qurban tersebut dibagikan 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk fakir miskin dan 1/3 untuk jiran/tetangga ini menunjukkan adanya sikap solidaritas.

Selanjutnya sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Drs. Wardijah, MSI mengatakan adanya suatu proses penerapan aspek kesejahteraan hewan dalam pelaksanaan qurban dan hewan yang akan di qurbankan harus benar-benar telah telah diperiksa Dokter Hewan (dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan) serta telah melalui proses pemeriksaan post-mortem setelah disembelih untuk memutuskan apakah daging aman dan layak dikonsumsi.

Plh. Kadis Kominfo Provsu H. M. Arub, SE juga menambahkan "kebika ingin menyembelih hewan qurban, petugas penyembelih harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam penyembelihan halal baik dan benar, peralatan seperti pisau untuk menyembelih harus benar-benar tajam serta memperlakukan hewan qurban dengan baik sebelum disembelih agar tidak terjadi stress dan daging yang dihasilkan baik".

Acara coffee morning ini dihadiri oleh Pejabat Struktural, Fungsional, Staf di Lingkungan Diskominfo Provsu serta mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Sumatera Utara, (PIP)





**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
Melaksanakan Penyembelihan Hewan Qurban 1437 H  
Kantor Diskominfo Provsu, Senin 12 September 2016









## SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Membuka Bimbingan Teknis PPID Provsu bagi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  
Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Kamis 15 September 2016





## GUBSU : INFORMASI PENTING BAGI KETAHANAN NASIONAL

Medan, Gubernur Sumatera Utara Ir. Tengku Erry Nuradi M, Si yang dalam sambutannya dibacakan oleh Pih. Kepala Dinas Kominfo Provsu H. M. ayub, SE sekaligus membuka acara Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPIID (Provsu) bagi PPIID Pembantu di lingkungan Pemprovsu yang berlangsung di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu Kamis (15/9).

Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraan Bimtek, yaitu untuk membekali dan meningkatkan pengetahuan para pengelola PPIID Pembantu di Lingkungan Pemprovsu dalam meningkatkan pelayanan informasi yang lebih baik.

Gubsu mengatakan Informasi merupakan unsur kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya juga merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik, benar dan profesional.



Penyelenggaraan Bimtek sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi pemerintah.

Sementara itu Robinson Simanungkalit selaku narasumber Komisiner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Bidang Penyelesaian Sengketa menyampaikan bahwa dalam prosedur permohonan informasi kesetiap Badan Publik diharuskan agar tiap pemohon informasi memberikan identitas lembaga sebagai salah satu syarat pemohon untuk mendapatkan informasi publik.

Pada dasarnya sengketa informasi berawal dari keberatan yang diajukan dari Pemohon kepada atasan PPIID berdasarkan alasan penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian, tidak disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapiya permintaan informasi, permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar dan penyampalan informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan kepada PPIID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu kesatuan yang utuh sebagai Badan Publik digunakan dalam memudahkan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat dan efisien. (PIP)







**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**  
Menghadiri Rapat Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara  
Ruang Kerja Kadis Kominfo Provsu, Jumat 16 September 2016











**KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum**  
Membuka Rapat Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)  
Hotel Dharma Deli Medan, Jumat 16 September 2016





**Plh. KADIS KOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**

Menghadiri Pembukaan Sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017  
Hotel Grand Antares Medan, Senin 19 September 2016





## RKPD 2017, PEMPROV SUMUT PRIORITASKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN

Medan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 mendatang, Pemrov Sumut prioritaskan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Sumut. Kedua hal ini menjadi prioritas pertama dari sembilan prioritas dalam RKPD 2017 ini. Pemrov Sumut inginkan setiap anak di Sumut bisa mudah bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tak tanggung-tanggung, kedua hal yang dijadikan prioritas pertama ini mendapat alokasi dana belanja 39,69% dari total APBD Provsu tahun 2017. Alokasi dana belanjanya sekitar Rp 4,71 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprovu Hasban Ritonga dalam acara sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 di Hotel Grand Antares, Senin (19/09/2016).

Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga yang mewakili Gubernur Sumatera Utara. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua Komisi E Syamsul Qodri Manurung, para asisten dan staf ahli, Kepala SKPD Provsu, dan Kepala Bappeda Sumatera Utara. RKPD tahun 2017 ini termaktub di dalam Pergub Sumut Nomor 22 tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui berbagai tahapan dianggap strategis karena merupakan tahun keempat dari RPJMD 2013-2018.

Sekda mengharapkan RKPD Provinsi Sumut untuk tahun 2017 bisa menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Provsu tahun 2017 dan menjadi landasan dalam penjabaran KUA PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2017. Prioritas RKPD selain peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Sumut

Sekda Provsu juga menjelaskan bahwa 9 prioritas RKPD Provsu tahun 2017 diantaranya adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Sumut, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan Sumut, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah.

"Prioritas selanjutnya, peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian, peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin, peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan, peningkatan kehidupan beragama, peningkatan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah (MP3KI, ME3EI, RAD-MDGS, RAD-PG, RAD-PK dan RAD-GRK)," papar Hasban.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis juga memaparkan alokasi dari anggaran yang direncanakan. Dalam paparannya Arsyad Lubis menjelaskan alokasi anggaran Rp 4,71 triliun yang terdiri atas belanja langsung Rp 321,37 milyar lebih untuk 3 SKPD (Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan olahraga dan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi).

Selain itu, Belanja hibah dan bansos yang diperuntukkan bagi penyaluran dana BOS dan dukungan kepada lembaga pendidikan tinggi sebesar Rp 3,144 milyar yang antara lain juga untuk fasilitas penguatan kelembagaan pendidikan di tingkat dini dan dasar. "Untuk Dinas Pendidikan, anggaran digunakan untuk pengadaan buku bacaan dan pengadaan alat peraga dan laboratorium, RKB jenjang SMK/SMU/MA, peningkatan kualitas guru dan penyelenggaraan UN. Badan perpustakaan juga mendapat alokasi dana. Sedangkan Badan Perpustakaan digunakan antara lain pengembangan perpustakaan binaan, peningkatan kualitas dan kuantitas buku-buku bacaan dan pengadaan buku perpustakaan keliling," jelasnya.

Untuk Dispora, alokasi dana Rencana Kerja Pembangunan Daerah digunakan untuk pembinaan klub-klub olahraga, pembangunan sport center antara lain pembangunan gedung pusat latihan 14 cabang olahraga, pembangunan wisma atlet, pembangunan taman olahraga (jogging track) dan pembangunan sirkuit sepeda roda, penjarangan atlet potensial dan pembinaan kepemudaan. Sektor pendidikan yang menjadi prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah, semoga bisa benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut. Kasus kecurangan di dunia pendidikan kiranya juga bisa segera diberantas supaya rencana peningkatan kualitas pendidikan Sumut bisa lebih optimal.





**SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE**  
Menghadiri Kunjungan Dewan Pertahanan Nasional  
Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubsu, Selasa 20 September 2016





## WANTANNAS KAJI SUMUT BAGI KEPENTINGAN NASIONAL

Medan, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan pengkajian daerah Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi terkini terkait pengaruh provinsi ini bagi kepentingan nasional. Kegiatan diawali dengan pertemuan dengan Pemprovsu yang diterima Sekda Hasban Ritonga di Medan, Selasa (20/9).

Tim Wantannas yang hadir terdiri atas Sekjen Letjen TNI M Munir, Staf Ahli Bidang Ekonomi Irjen Pol Bambang Hermanu, Staf Ahli Bidang Hankam Mayjen TNI Nana Rohana, dan Analis Kebijakan Bidang Demografi Sisnas Kol Laut Moch Taufiq Hidayat. Hasban menyambut gembira kehadiran Wantannas yang melakukan kunjungan ke Sumut selama empat hari. Sekda memaparkan mengenai Sumut kepada rombongan Wantannas serta situasi terkini.

Munir menjelaskan bahwa pengkajian daerah yang dilakukan di Sumut bertujuan untuk mencari data dan fakta dalam rangka perumusan kebijakan nasional. "Kita juga menggali masalah ipoleksosbudhankam serta risiko pembangunan nasional di daerah yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional," katanya.

Dia mengatakan, Wantannas banyak menampung aspirasi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung untuk dikumpulkan dan dianalisis khususnya hal yang berkait permasalahan nasional. "Produk kami untuk Presiden, untuk membantu Presiden. Termasuk kedatangan ke sini," kata Munir.

Beberapa pertanyaan yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain adalah mengenai harga karet yang terpuruk serta pengaruhnya terhadap ekonomi Sumut, dampak erupsi Gunung Sinabung, penyelesaian konflik SARA Tanjung Balai, dan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kunjungan empat hari Wantannas juga diisi dengan pertemuan dengan Kapolda, Pangdam I/BB, PT Pelindo, Lantamal I Belawan, PTPN III, serta kunjungan ke kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir.







# **EDISI JULI-SEPTEMBER**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA